

Available online at: [Journal of Social and Policy Issues \(pencerah.org\)](http://Journal of Social and Policy Issues (pencerah.org))

Journal of Social and Policy Issues

E-ISSN: 2807-3843

Implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Barat Tentang Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan di Perairan Danau Singkarak

Putri Kumala Sari, Sujianto

Ilmu administrasi Publik, Universitas Riau, Kampus Bina Widya, Jalan HR Soebrantas Km 12,5 Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, Riau 28293

ARTICLE INFORMATION

Received: August 06, 2021
 Revised: October 29, 2021
 Accepted: December 17, 2021
 Available online: December 30, 2021

KEYWORDS

Policy Implementation, Bagan Fishing Equipment, Singkarak Lake.

CORRESPONDENCE

Name: Sujianto
 E-mail: sujianto@lecture.unri.ac.id

A B S T R A C T

This study focus on the implementation of government policies related to the use of fishing gear that is not environmentally friendly in the Singkarak Lake. The background of the problem in this study is the use of large enough fishing gear and the disruption of the balance and preservation of fish in Singkarak Lake, especially the typical fish of the lake, namely Bilih fish. The theoretical concept used in this research is the theory of implementation of Van Meter Van Horn's policy in Sujianto in 2008. The method used in this research is a descriptive qualitative approach with a case study method. Data Collection Technique in this study are observation, interview and documentations. The results in this study indicate that the implementation of the Regulations Governor Sumatra West Number 81 Year 2017 about Use Tool and material Arrest Fish in waters Lake Singkarak has not been realized properly. The inhibiting factors in this research include socialization, my sources, and awareness of the fishing community.

PENDAHULUAN

Salah satu provinsi yang banyak terdapat danau di daerahnya yaitu Provinsi Sumatera Barat. Provinsi ini memiliki lima danau yang dapat mendukung potensi perikanan masyarakat. Kelima danau tersebut adalah Danau Talang, Danau Maninjau, Danau Diateh, Danau Bawah, dan Danau Singkarak. Danau ini dimanfaatkan sebagai irigasi, PLTA, sebagai objek wisata, dan danau ini dimanfaatkan untuk perikanan melalui kegiatan penangkapan oleh penduduk sekitar dengan memanfaatkan keberadaan ikan bilih sebagai ikan endemik yang ada di perairan danau singkarak.

Sebagian besar masyarakat di sekitar danau, menjadikan perikanan sebagai mata pencarian dari pertumbuhan ekonomi dan sumber penghasilan masyarakat salah satunya yaitu Kabupaten Tanah Datar. Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu daerah yang kaya akan sumber daya hayati dengan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan nelayan adalah dengan meningkatkan produksi hasil tangkapan. Sebagian masyarakat di kawasan tersebut menangkap ikan menggunakan alat tangkap bagan dengan tujuan mendapat hasil tangkapan yang besar.

Melalui diterbitkannya Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan di Perairan Danau Singkarak, Gubernur Sumatera Barat mengambil langkah strategis untuk mengatasi masalah lingkungan penggunaan alat tangkap terlarang.

Dalam kajian ini permasalahan yang terjadi hanya di fokuskan pada pasal 3 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Tentang Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan di Perairan Danau Singkarak yang menjabarkan mengenai larangan

untuk menggunakan alat tangkap bagan di Danau Singkarak. Menurut fakta yang terjadi, alat tangkap bagan di perairan Danau Singkarak cukup banyak pada tahun 2019 sebanyak 534 unit (Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat). Kegiatan penangkapan ikan ini sangat memprihatinkan, karena adanya kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dalam jangka panjang, dan jika tidak dikelola secara efektif, dapat mengakibatkan kerusakan sumber daya yang parah di masa depan. Karena alat tangkap ini menggunakan jaring rapat yang berukuran 1 ml, maka semua jenis ikan baik ikan kecil maupun ikan besar bisa ditangkap semua dengan menggunakan bagan. Penggunaan bagan di perairan Danau Singkarak dapat mengakibatkan penurunan populasi ikan bilih (*Mystacoleucus padangensis*) yang merupakan komoditas andalan dan sumber pendapatan nelayan, serta mengancam populasi ikan di Danau Singkarak. Almohdar dkk (2013) dalam penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa alat tangkap bagan mengindikasikan terjadinya eksploitasi yang merusak keseimbangan ekologi sumber daya ikan di perairan. Karena penggunaan alat tangkap ini lebih eksploitatif terhadap ikan kecil yang tidak layak untuk ditangkap.

Jadi Jaring angkat (bagan) bisa menghasilkan tangkapan dalam jumlah besar, tapi banyak tangkapan ikan yang terbuang karena ukuran ikan terlalu kecil sehingga berdampak terhadap menurunnya populasi ikan di perairan danau singkarak. Ikan bilih telah menjadi primadona ekonomi masyarakat yang tinggal di dekat Danau Singkarak dalam beberapa tahun yang lalu. Namun, tingkat pemanfaatan potensi ikan bilih di Danau Singkarak semakin berkurang dari tahun ke tahun. Menurut

penelitian yang dilakukan Universitas Bung Hatta (UBH), 52 persen ikan bilih yang diperoleh dengan alat tangkap bagan terbuang sia-sia karena ukuran ikan yang terlalu kecil dan tidak memiliki nilai ekonomis. Akibatnya, hasil tangkapan ikan bilih yang merupakan ikan asli Danau Singkarak menurun drastis hingga 80%.

Dalam hal ini sangat penting untuk membatasi penggunaan peralatan terlarang tersebut demi menjaga populasi sumber daya ikan di perairan Danau Singkarak dari ancaman kepunahan. Dalam Peraturan ini memiliki pokok bahasan dalam hal memberikan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat (Utomo, 2020). Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat bertujuan untuk melestarikan populasi perikanan di Danau Singkarak dengan melarang penggunaan alat tangkap yang merusak kelestarian ikan, namun upaya ini banyak diabaikan oleh masyarakat nelayan karena kebijakan penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan ini belum diketahui sepenuhnya oleh masyarakat nelayan sehingga masih terdapat masyarakat nelayan yang belum mengetahui larangan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti bagan, serta bagi masyarakat yang sudah mengetahui kebijakan penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan di perairan Danau Singkarak juga memiliki kesadaran yang kurang untuk mengganti alat tangkap yang tidak ramah lingkungan ini, dimana masyarakat nelayan bagan hanya memikirkan kepentingan masing-masing tanpa melihat apa akibat kedepannya.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Seh Lena Siregar pada tahun 2019 yaitu mengenai Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Tarik di Dinas Perikanan Kota Sibolga. Dimana pada penelitian tersebut memaparkan bahwa peraturan tersebut belum terimplementasi secara baik. Masih terdapat nelayan yang menggunakan alat tangkap pukat tarik yang disebabkan minimnya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah terhadap nelayan.

Berbagai masalah dan fenomena sosial yang terjadi dapat didekati dan (coba) diselesaikan dengan kebijakan publik (Agustino, 2016). Menurut Nugroho (2004) kebijakan publik adalah penggerak seluruh kehidupan bersama, seluruh organisasi, baik pemerintahan, bisnis, maupun nirlaba, disetiap negara. Pengikutsertaan publik dalam ranah analisis kebijakan diyakini sebagai bagian untuk menetapkan bahwa analisis kebijakan bukanlah semata-mata proses rasional belaka, tetapi juga harus memenuhi aspirasi rakyat (Indiahono, 2017). Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Mulyadi (2018) dimana di dalamnya terkandung beberapa indikator yang menjadi dasar dan menuntun arah penelitian ini menjadi lebih terarah. Adapun indikator tersebut yaitu 1. Standar dan sasaran kebijakan, 2. Sumber Daya, 3. Hubungan antar organisasi 4. Karakteristik Pelaksana, 5. Kondisi sosial, politik dan ekonomi, 6. Disposisi implementor.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus dan bersifat deskriptif. Pada penelitian kualitatif fokus/masalah penelitian diharapkan berkembang sesuai dengan kenyataan di lapangan (Pasolong, 2016). Menurut Menurut Creswell (2016 : 16) penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan pengumpulan data,

analisis, serta interpretasi data. Studi kasus menurut Creswell (2016) adalah rancangan penelitian dimana peneliti mengembangkan dan menganalisis secara mendalam mengenai suatu kasus yang diteliti baik itu sebuah program, peristiwa, aktivitas, dan proses mengenai fenomena sosial yang berhubungan dengan penggunaan alat tangkap ikan di Danau Singkarak.

Adapun lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di Danau Singkarak dengan lokus pada Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat sebagai implementor dari kebijakan tersebut. Informan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling. Berikut merupakan informan penelitian yang menjadi narasumber dalam penelitian ini: 1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat, 2. Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan Sub Perikanan Bidang Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat, 3. Kepala seksi pengawasan sumber daya kelautan perikanan sub bidang UPTD Konservasi dan PSDKP Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat, 4. Kepala Seksi kenelayanan dan kelembagaan Sub Perikanan Bidang Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat, 5. Kelompok Masyarakat Pengawas Kabupaten Tanah Datar, 6. Masyarakat di kawasan danau Singkarak, 7. Nelayan Bagan.

Sedangkan teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model analisis data Miles dan Huberman (1992) dalam Moleong (2007) yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian pertama, pembahasan mengenai indikator-indikator implementasi. Bagian kedua, dibahas mengenai hambatan-hambatan yang muncul dalam implementasi pergub tersebut beserta upaya pemecahannya. Secara lebih jelas pembahasan mengenai kajian ini dapat dilihat pada pembahasan berikut:

A. Implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan di Perairan Danau Singkarak.

Menurut George C. Edward III dalam (Sutejo et al., 2020) mengemukakan beberapa variabel yang mempengaruhi implementasi (Ajtai et al., 2010) kebijakan (Rizki, n.d.) yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Peraturan ini merupakan suatu aturan yang dibuat pemerintah untuk untuk tetap menjaga kelestarian populasi ikan khususnya ikan bilih (*mystacoleucus padangensis*). Donald Van Meter dengan Carl Van Horn menyebutkan Indikator-indikator yang mempengaruhi Implementasi (Aneta, 2012) sebagai berikut:

Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar kebijakan merupakan tolak ukur apakah suatu kebijakan dinilai berhasil atau gagal. Standar kebijakan harus jelas dan terukur sehingga tidak menimbulkan inteprestasi yang dapat menimbulkan konflik diantara agen implementor. Dengan demikian standar kebijakan ini menjadi tolak ukur sejauh mana keberhasilan pelaksanaan kebijakan penggunaan alat dan bahan penangkapan di Perairan Danau Singkarak. Kemudian hal penting yang juga diperhatikan bahwa dalam menentukan kebijakan haruslah sesuai dengan sosio kultur dan bersifat

relistik pada tingkat pelaksanaan implementor sebab kondisi tersebut juga membawa pengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.

Dalam melakukan sebuah implementasi dibutuhkan standar dan sasaran kebijakan (Putri, 2020) dari suatu kebijakan yang akan dilaksanakan yang harus diidentifikasi dan diukur, karena sebuah kebijakan tidak dapat berhasil atau dapat mengalami kegagalan apabila standar atau tujuan dan sasaran kebijakan tidak berjalan dengan baik. Kebijakan juga digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Winarmo, 2016).

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat: *"Maksud dari kebijakan tersebut adalah untuk melarang pengguna Bagan dan mengimbau mereka untuk menghentikan aktivitas alat tangkap Bagan. Alat tangkap Bagan ini tidak diperbolehkan karena merusak ekosistem danau, merusak ikan Billi dan konflik antara nelayan tradisional dengan nelayan Bagan"* (Wawancara dengan Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, 12 Maret 2021).

Sesuai dengan Peraturan tentang Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan di Perairan Danau Singkarak ini, yang menjadi alasan pembuatan peraturan tersebut adalah untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan khususnya ikan bilih (*mystacoleucus padangensis*) dari ancaman kepunahan, perlu diatur penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan di Perairan Danau Singkarak.

Ikan bilih merupakan ciri khas dari kabupaten danau singkarak maka dari itu dibuat kebijakan atau peraturan mengenai Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan Di Perairan Danau Singkarak untuk melindungi sumber daya ikan dan untuk menjaga kelestarian ikan di perairan danau singkarak khususnya ikan bilih. Melalui peraturan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menjaga dan meningkatkan sumber daya ikan khususnya ikan bilih yang terancam punah. Karena penggunaan alat tangkap semacam ini akan mengakibatkan penangkapan ikan secara terus menerus dan akan mengancam populasi ikan Bilih dalam skala yang cukup besar. Selain itu dari peraturan ini juga diharapkan bisa mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat kawasan danau singkarak umumnya.

Dari sisi nelayan mereka juga belum memahami seutuhnya apa tujuan dari kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kurangnya informasi menyebabkan adanya perbedaan pendapat antara masyarakat nelayan bagan dengan pemerintah karena nelayan bagan kurang mengetahui tentang peraturan tersebut. Selain itu kurangnya kesadaran juga dapat kita lihat dari pengakuan nelayan bagan diatas yang tidak bisa merasakan akibat dari menggunakan alat tangkap ikan dengan menggunakan bagan itu bisa mengakibatkan populasi ikan bilih punah.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sasaran dan tujuan sudah jelas dan pihak dinas kelautan dan perikanan sudah memahami kebijakan tersebut. Namun dari nelayan bagan sendiri belum mengetahui apa yang menjadi standar dan tujuan dari kebijakan tersebut dengan demikian masih banyak masyarakat nelayan di Perairan Danau Singkarak yang menggunakan alat tangkap bagan tanpa mengetahui apa akibatnya. Hal tersebut dikarenakan kurangnya informasi dan pemahaman dari kelompok nelayan bagan.

Sumber Daya

Sumber daya adalah suatu faktor vital dalam menjalankan suatu kebijakan (Kalangi, 2015). Berhasilnya suatu proses implementasi kebijakan juga sangat ditentukan oleh bagaimana kemampuan para implementor dalam memanfaatkan sumberdaya yang ada. Dalam pelaksanaan dimana kebijakan ini secara tidak langsung juga mengawasi terkait penggunaan peralatan untuk menangkap hasil danau jika ditinjau dalam hal jumlah sumber daya manusia sudah mencukupi. Namun terkait dengan sumber dana dan kemampuan untuk menyediakan sarpras masih belum cukup untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.

Berikut beberapa sumber daya yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan:

Sumber Daya Manusia

Dalam penelitian ini sumber daya manusia yang dimiliki sudah cukup dalam pelaksanaan kebijakan penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan di Perairan Danau Singkarak. Dalam melakukan pengawasan di Danau Singkarak pokmaswas masing-masing kabupaten. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat *"Tidak ada hambatan sumber daya manusia karena pelaksanaan kebijakan penggunaan alat tangkap dan alat tangkap dipimpin oleh pihak provinsi dan didukung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok dan Tanah Datar, yang memiliki anggota 150 orang, sekaligus pokmawas juga berperan dalam hal pengawasan"*. (Wawancara dengan Kasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan, 8 maret 2021)

Dalam melakukan penertiban Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dibantu oleh pemerintahan Kabupaten/Kota dan Aparat Keamanan. Dukungan dari sumber daya yang berkualitas juga menentukan berhasil atau tidak nya suatu implementasi kebijakan. Kualitas sumber daya manusia memiliki kaitan dengan profesionalitas, keterampilan, dedikasi, dan kompetensi di dalam bidangnya masing masing.

Sumber Daya Anggaran

Dalam proses implementasi suatu kebijakan bukan hanya memerlukan manusia sebagai salah satu faktor penting, namun selain itu sumber daya bukan manusia juga perlu untuk diperhatikan, seperti ketersediaan fasilitas pendukung. Pada hakikatnya, sumber daya bukan manusia mempunyai arah yang sama yaitu mendukung kelancaran dari proses implementasi suatu kebijakan tersebut. Fasilitas berupa anggaran yang cukup merupakan suatu nilai plus bagi implementor untuk membuat dan menjalankan suatu program dalam rangka mencapai tujuan implementasi kebijakan tersebut. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa anggaran yang tersedia belum mencukupi untuk menjalankan kebijakan tersebut. Porsi dari anggaran itu sendiri digunakan oleh dinas terkait untuk mengganti alat tangkap ikan yang dilarang dan digunakan untuk pelaksanaan pengawasan di sekitar danau. Hal ini berlandaskan dengan hasil wawancara bersama Kepala Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang mengatakan bahwa: *"Menilai sumber dana anggaran, kami telah mengalokasikan dana untuk pelaksanaan Pergub, namun anggaran tersebut tidak mencukupi untuk mendukung pelaksanaan Pergub"*. (Wawancara dengan Kasi Pengelolaan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan, 8 Maret 2021)

Sumber daya Sarana dan Prasarana

Sumber daya sarana dan prasarana merupakan salah satu komponen yang mendukung berhasilnya implementasi dalam

suatu kebijakan. Adapun sarana dan prasarana yang dapat menunjang yaitu seperti bangunan/ gedung, alat-alat kantor, dan fasilitas lainnya. Dalam penelitian ini hasil yang didapat menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki dinas terkait termasuk ke dalam kategori belum mencukupi. Menurut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan yang menyatakan bahwa: *"Sarana dan prasarana kita juga kurang memadai. Hanya ada tiga speedboat untuk pengawasan di Danau Singkarak, dan ada ruang untuk sekitar 25 orang dalam hal pemantauan."* (Wawancara dengan Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan, 8 Maret 2021). Dari hal tersebut terlihat bahwa jumlah speedboat yang dimiliki hanya berjumlah sebanyak 3 unit saja, tentunya hal ini belum sebanding dengan luasnya danau yang akan diawasi.

Komunikasi Antar Organisasi

Hubungan yang diciptakan oleh pelaksana suatu peraturan bisa dilihat dari aspek komunikasi yang berjalan baik di wilayah internal instansi itu sendiri. Komunikasi dalam hal ini adalah komunikasi yang saling terhubung di dalam lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, baik hubungan ke atas (vertikal) ataupun komunikasi dengan cara horizontal antara sesama pegawai.

Dalam penerapannya komunikasi yang terbangun antara atasan dan bawahan dari pihak pelaksana kebijakan terjalin dengan baik, hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Seksi Kenelayanan dan Kelembagaan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat: *"Sejauh ini, komunikasi internal berjalan lancar. Format komunikasi internal yang berlangsung hanya ditujukan untuk pertemuan formal dan diskusi kecil lainnya. Karena itu, komunikasi di sini fleksibel. Jika ada informasi dari atasan maka akan disampaikan kepada anggotanya."* (Wawancara dengan Kasi Kenelayanan dan Kelembagaan, 12 Maret 2021). Dimana dalam hal ini informasi yang ada disampaikan secara baik dan saling memberikan pendapat terkait pelaksanaan kebijakan tersebut. Dari sisi koordinasi sudah melibatkan beberapa pihak terkait antara lain yaitu, Pemprov, TNI, Polri, Pemkab, Wali Nagari, serta Forkopimda setempat. Hal ini merupakan salah satu cara komunikasi antar instansi mengenai kebijakan yang telah dibuat dan dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat agar bisa membantu dan ikut berpartisipasi ke depan.

Selain itu pemerintah terkait juga di ketahui bahwa pembinaan dalam penggunaan alat yang tidak ramah lingkungan dalam bentuk pelatihan, bimbingan, dan penyuluhan belum dilaksanakan. Namun pembinaan dalam bentuk sosialisasi sudah dilaksanakan langsung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat kepada pihak nagari dan pihak nagari yang akan menyampaikan langsung kepada masyarakat.

Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana tidak terlepas dari struktur birokrasi, norma-norma dan pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Suatu tatanan organisasi yang kompleks dan interval kendali yang panjang dapat menjadi penyebab terhambatnya dan lambatnya proses penyampaian informasi dari pihak atasan ke bawahan ataupun sebaliknya. Maka dari itu Sebagai implementor Dinas Kelautan

dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat perlu didukung dengan tatanan organisasi yang sederhana dan tidak rumit agar implementor dapat melaksanakan kebijakan dengan mudah dan komunikasi yang terjalin dapat berjalan dengan lancar.

Selain itu, norma dan nilai yang terdapat dalam instansi tersebut merupakan hal yang cukup mempengaruhi terhadap kinerja para pelaksana dalam menjalankan tugas serta fungsinya. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat juga mempunyai beberapa nilai dan norma yaitu seperti kedisiplinan para pegawai yang diuraikan berdasarkan pengoptimalan jam kerja baik dari sisi kehadiran, waktu istirahat, serta terkait dengan jam kedatangan dan jam pulang kerja. Terkait dengan hal itu, dinas kelautan dan perikanan belum mempunyai tatanan aturan tersendiri terkait kedisiplinan dalam bekerja pada saat melaksanakan peraturan tersebut, melainkan aturan yang ada hanya mengacu kepada aturan ASN secara umum.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat juga telah melaksanakan pengecekan kepada masyarakat nelayan di sekitar Danau Singkarak yang menggunakan jaring angkat (bagan) dengan melakukan beberapa hal yaitu dengan memutuskan tali jaring angkat, pelepasan jaring dan pelampung serta pihak dinas juga tidak segan untuk menenggelamkan bangunan bagan yang ada. Akan tetapi penertiban melalui kegiatan razia tidak bisa dilakukan pada tahun ini dikarenakan wabah covid-19 yang terjadi di seluruh wilayah termasuk di Provinsi Sumatera Barat.

Diketahui bahwa karakteristik agen pelaksana untuk penertiban alat tangkap bagan yang tidak ramah lingkungan ini setiap pihak sudah menjatuhkan sanksi hukum dan tegas terhadap pemberhentian pengoperasian alat tangkap tersebut yaitu dengan melakukan razia kepemilik bagan supaya menghentikan pengoperasian mereka, dan apabila hal tersebut tidak dihiraukan akan dilakukan pemutusan tali sampai kepada penenggelaman.

Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Kondisi Sosial

Kondisi sosial mengenai hal ini masih banyak yang merasa apabila tidak menangkap ikan dengan alat tangkap bagan maka mereka tidak akan bisa menghasilkan uang dan menghidupi kehidupan sehari-hari sementara akibat yang ditimbulkan dari hal tersebut juga mereka tidak menyadarinya. Seharusnya masyarakat sadar akan akibat yang ditimbulkan, akibat perbuatan mereka menangkap ikan dengan alat tangkap bagan maka populasi ikan akan punah.

Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi yang maksud adalah kondisi dimana masyarakat memanfaatkan hasil dari sumber daya ikan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi disini dirasa akan meningkat karena sebagian besar mata pencaharian masyarakat adalah nelayan tetapi pada kenyataannya edukasi mengenai alat tangkap bagan ini sudah diberikan kepada masyarakat bahwasanya alat tangkap bagan tersebut tidak ramah lingkungan tetapi kesadaran tersebut masih belum ada sampai saat sekarang ini.

Kondisi Politik

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa kondisi politik juga mempengaruhi kebijakan ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan daerah

mengenai alat tangkap bagan ini supaya bisa di minimalisir penggunaannya karena kelestarian ikan bilih yang menjadi ciri khas danau singkarak bisa punah apabila digunakan secara terus menerus. Seharusnya pemerintah memberikan solusi untuk permasalahan ini bukan hanya memberikan sanksi.

Disposisi Implementor

Sikap disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diamanatkan sebagai pelaksana kebijakan haruslah dimiliki oleh para implementor. Keberhasilan proses implemenasi kebijakan juga dipengaruhi oleh seperti apa sikap pelaksana dan reaksi berbagai implementor terhadap kebijakan yang diturunkan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa implementor sangat mendukung sekali penguatan penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan di perairan danau singkarak. Implementor merasa dengan adanya Peraturan ini dapat mengelola dan mengatur masyarakat yang memanfaatkan sumberdaya perikanan tanpa merusak kelangsungan ekosistem perikanan.

Dalam implementasinya kebijakan ini sudah mendapat dukungan dari para implementor dan peraturan ini dibuat bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi melainkan agar ikan bilih yang menjadi ciri khas danau singkarak tetap terjaga kelestariannya.

Adapun terkait dukungan terhadap kebijakan ini, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, yang menyatakan bahwa: "*Kami mendukung pelaksanaan pemeriksaan ikan dalam kerangka Peraturan Gubernur tentang penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan. Kebijakan ini menetapkan sistem hukum untuk penanganan alat tangkap dan pada saat yang sama melindungi stok ikan. Efek yang dicapai adalah keberlanjutan ekosistem perikanan dan kesejahteraan para pengguna sumber daya ikan tersebut.*". (Wawancara dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, 12 Maret 2021)

Dari pernyataan narasumber diatas, dapat diketahui bahwa implementasi Peraturan Gubernur ini sudah mendapat dukungan dari para implementor dan peraturan ini dibuat bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi melainkan agar ikan bilih yang menjadi ciri khas danau singkarak tetap terjaga kelestariannya.

B. Faktor-Faktor Penghambat Kegiatan Implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017.

Sosialisasi

Pengertian sosialisasi pada hakikatnya merupakan proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya (Herdiana, 2018). Sosialisasi merupakan salah satu penghambat pengimplemetasian kebijakan penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan di Danau Singkarak Kabupaten Tanah Datar. Hal ini dikarenakan tidak adanya sosialisasi yang dilakukan dari pemerintah ke masyarakat. Sedangkan tolak ukur keberhasilan yaitu jika informasinya sampai pada tingkat paling bawah dan sasaran program yaitu masyarakat nelayan bagan. Dinas kelautan dan perikanan provinsi sumatera barat juga melakukan sosialisasi baik itu berupa spanduk, media sosial dan secara langsung seperti kegiatan pelestarian ikan bilih di sekitar danau singkarak dengan membentuk kelompok masyarakat pengawas sekitar danau, bertugas untuk mengawasi masyarakat nelayan yang masih mengoperasikan kegiatan yang tidak ramah

lingkungan. Namun media komunikasi itu tidak dapat diketahui secara keseluruhan. Oleh karena itu, sosialisasi yang belum optimal ini merupakan penghambat dalam mencapai tujuan dari kebijakan penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan di perairan danau singkarak.

Sumber Daya

Adapun yang menjadi fokus kajian yaitu sumber daya prasarana dan anggaran. Hal tersebut tertuang dalam rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Dalam rencana strategis tersebut dapat diketahui bahwa anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat untuk sosialisasi alat tangkap yang tidak ramah lingkungan belum mencukupi, pada 2018 hanya 88 juta, 95 juta pada 2019, dan 100 juta pada 2020. Anggaran yang tertera dalam renstra itu tidak hanya dialokasikan untuk kepentingan pelestarian populasi ikan Bilih di Danau Singkarak, tetapi juga mencakup seluruh wilayah Sumatera Barat. Terlihat bahwa pihak dinas tampaknya tidak memiliki anggaran yang cukup untuk mengganti alat tangkap bagi masyarakat nelayan bagan di perairan danau Singkarak.

Kesadaran Dari Masyarakat

Dalam suatu kebijakan, kesadaran akan kebijakan itu sendiri sangat dibutuhkan. Masyarakat harus mengikuti dan menaati aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar kebijakan yang telah dibuat tersebut berjalan dengan efektif dan efisien. Kenyataan yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan alat tangkap bagan yang tidak ramah lingkungan ini masih sangat kurang, mereka hanya memikirkan kepentingan masing-masing tanpa melihat apa akibatnya kedepan. Hal tersebut dapat dibuktikan dari rasa takut masyarakat akan hilangnya mata pencaharian mereka apabila implementasi peraturan tersebut diberlakukan dan penggunaan alat tangkap bagan ini dihapuskan atau ditiadakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan penelitian yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 81 Tahun 2017 Tentang Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan Di Perairan Danau Singkarak belum terealisasi dengan baik. Dalam konteks kajian ini terdapat tiga faktor yang menghambat dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Adapun faktor penghambat tersebut yaitu Sosialisasi yang belum optimal, Sumberdaya yang belum memadai terutama dari sisi anggaran, dan Kesadaran dari masyarakat yang kurang akan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan alat tangkap bagan tersebut.

REFERENSI

- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. ALFABETA.
- Ajtai, G., Hegyi, N., Petruska, E., & Perczel Forintos, D. (2010). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–11.
- Aneta, A. (2012). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 54. <https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.132>
- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, 1(3), 13–26.

- http://www.stiacimahi.ac.id/?page_id=1181%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/337485273_Sosialisasi_Kebijakan_Publik_Pengertian_dan_Konsep_Dasar
- Indiahono, D. (2017). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Gava Media.
- Kalangi, R. (2015). Pengembangan sumber daya manusia dan kinerja aparat sipil negara di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 2(1), 1–18.
- Nugroho, R. (2004). *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi*.
- Pasolong, H. (2016). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. ALFABETA.
- Putri, I. E. (2020). Implementasi Peran Pemerintahan Daerah Dalam Pelestarian Populasi Ikan Bilih Di Danau Singkarak Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2017. 2(2), 128–137.
- Rizki, N. P. (n.d.). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUT ASAP DI KOTA PONTIANAK. *Publika, Jurnal S-Ilmu Administrasi Publik*.
- Sutejo, D., Kusmanto, H., Warjio, W., & Lubis, A. A. (2020). Implementasi Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(2), 162–167. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v2i2.56>
- Utomo, W. S. (2020). IMPLEMENTASI KEWENANGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM MELAKUKAN PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP SUMBER DAYA KELAUTAN DI TERITORIAL 0 SAMPAI 12 MIL LAUT BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi di Dinas Kelautan dan Peri. *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(1), 12–26. http://www.nostarch.com/javascriptforkids%0Ahttp://www.investopedia.com/terms/i/in_specie.asp%0Ahttp://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/35612/1/Trabajo_de_Titulacion.pdf%0Ahttps://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/01/GUIA-METODOL
- Winarmo, B. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi : Teori, Proses, Dan Studi Kasus Komparatif*. CAPS.